

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi masih menjadi teori pokok dalam masalah tata kelola perusahaan. Teori agensi (*agency theory*), menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan hubungan antara prinsipal dan agen dimana prinsipal memberikan kekuasaan atau melimpahkan wewenang kepada agen (Hestanto, 2020).

Hal ini juga dijabarkan oleh Scott (2000) menyatakan bahwa inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen (Hestanto, 2020).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan *principal* tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai

akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi (*information asymmetries*) (Hestanto, 2020).

Teori ini mengatur hubungan antara prinsipal (principals) dan agen (agent). Pemilik perusahaan mengamanahkan pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan kepada agen dan agen bertanggung jawab penuh dalam memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, teori keagenan ini berkaitan dengan distribusi tanggung jawab dari pemilik kepada manajer dalam menjalankan perusahaan (Fajri, 2022).

2.2 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat menggunakan analisis laporan keuangan atau analisis rasio. Ross dkk. (2009:78) menyatakan bahwa rasio merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada diantara berbagai bagian informasi keuangan. Rasio yang umum digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas (Arifani, 2013)

Dalam rasio likuiditas, hal-hal utama yang diukur adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek tanpa ada tekanan yang berlebihan (Ross dkk., 2009:79). Rasio ini

memfokuskan pada aset lancar dan kewajiban lancar. Solvabilitas adalah kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Ross dkk., 2009:83). Pengukuran solvabilitas ini dapat disebut juga leverage ratio. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan asset dan mengelola operasinya secara efisien (Ross dkk., 2009:89). Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Untuk para pemegang saham (pemilik perusahaan), rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam investasi (Arifani, 2013).

2.2.1 Tujuan Kinerja Keuangan Perusahaan

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Jumingan (2009:239) (Sanjaya & Rizky, 2016).

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Pada penelitian ini kinerja keuangan akan diidentifikasi menggunakan *Rasio Profitabilitas* yang akan diprosikan menggunakan *Net Profit Margin*, yaitu Untuk melihat kemampuan manajemen dalam mengoperasikan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan melihat seberapa tinggi laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan (D. Leon, 2018).

2.3 Good Corporate Governance (GCG)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan *akuntabilitas* perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para *Stakeholders* berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan, yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham, Pemerintah, Investor, Karyawan, Mitra Bisnis, Pelanggan, Masyarakat terutama di sekitar tempat usaha Perusahaan;

Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi; Karyawan adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat Perusahaan yang berwenang sebagai Karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan;

Pihak Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan atau kekeluargaan dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan Perusahaan itu sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta Karyawan Perusahaan (Finance, 2017)

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indra Surya

dalam buku Penerapan *Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* yang mengutip pengertian dari *Price Waterhouse Coopers* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai

proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*”.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syariah adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholder*”.

Sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri dalam buku *Good Corporate Governance*:

Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerja, dimana di dalamnya terdapat sistem yang mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. Selain itu *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholders* (Unggul, 2018).

Dalam tulisan Avianti (2006) yang dikutip dari Nestor, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ada dua

konteks definisi *Good Corporate Governance* (GCG); pertama, merupakan hubungan dan pola perilaku yang berbeda yang berkaitan dengan kewajiban para manajer, pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan kunci, serta masyarakat, untuk membentuk strategi perusahaan. Konteks tersebut disebut sebagai sisi berperilaku tata kelola perusahaan (*Behavioral Side Of Corporate Governance*), kedua, tata kelola perusahaan berkaitan dengan seperangkat peraturan tentang kerangka hubungan dan perilaku perusahaan swasta, kemudian membentuk perumusan strategi perusahaan, hal ini dapat berupa hukum perusahaan, peraturan sekuritas dan persyaratan listing, tetapi dapat juga menjadi peraturan yang disusun oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat disebut sebagai sisi normatif dari tata kelola perusahaan (*Normative Side Of Corporate Governance*). Masih dalam tulisan (Wuisan et al., 2020).

Menurut Muh. Arief Effendi (2009), *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Variabel independen yang termasuk kedalam Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan para pemegang saham. Adapun tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris.

b. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Independensi diharapkan timbul dengan keberadaan komisaris independen. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

c. Komite Audit

Keberadaan Komite Audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Menurut Kep. 29/PM/2004 Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu Komite Audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

d. *Net Profit Margin*

Menurut Jumingan (2014) *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi. Semakin besar *Net Profit Margin*, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari pendapatan operasional. Semakin besar rasio ini, akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Hubungan antara laba bersih dan pendapatan operasional menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modal untuk suatu resiko. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu *profitable* atau tidak

(Sushanty & Hasibuan, 2018). Pada penelitian ini *Net Profit Margin* merupakan proksi dari Kinerja Keuangan yang mana *Net Profit Margin* digunakan untuk menghitung pertumbuhan laba pada perusahaan.

2.3.2 Karakteristik *Good Corporate Governance*

Menurut Dani dan Hasan (2005), factor- faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik *Corporate Governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya (Suryanto & Refianto, 2019).

Di kutip dari Jurnal (Praningrum, 2016) *Good Corporate Governance*, ada lima prinsip yang harus diterapkan, prinsip-prinsip itu adalah (Kaihatu, 2006:2) :

a. *Transparency* (Pengungkapan dan Transparansi)

Prinsip *transparency* atau pengungkapan dan transparansi menjelaskan bahwa manajemen tidak menutupi proses dari kinerja perusahaan dari para pemegang kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Informasi materiil dan relevan diungkapkan dengan terbuka.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip *accountability* menjelaskan bahwa memberikan penjelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab manajemen perusahaan dalam mengelola kegiatan operasi perusahaan, sehingga kinerja perusahaan efektif. Disamping itu, dewan komisaris juga menjalankan perannya sebagai pengawas terhadap manajemen atas kinerja dan pencapaian target mereka.

c. *Responsibility* (Tanggungjawab)

Prinsip *responsibility* atau tanggungjawab menjelaskan, perusahaan memenuhi dan mematuhi hukum yang berlaku dan menjalin kerjasama atau koordinasi yang baik dengan para pemegang kepentingan serta kesesuaian dengan prinsip korporasi yang sehat. Hal yang dapat dilakukan adalah pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial, melindungi hak-hak dan kepuasan konsumen, profesional dan menjalankan etika yang berlaku di masyarakat.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah perusahaan sebaiknya dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan. Selanjutnya, tidak boleh ada campur tangan pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness atau keadilan adalah perusahaan menjamin hak pemegang saham dan memberikan perlakuan yang sama terhadap *stakeholder* yang ada. Hak-hak tersebut berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.3.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Man dan Wong (2013; 5-6), Mekanisme *Good Corporate Governance* digolongkan menjadi mekanisme eksternal dan internal (Nuriyatun, 2014).

A. Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal ditentukan oleh faktor-faktor luar perusahaan yang bertujuan untuk mengatur perusahaan-perusahaan dalam mendukung kepentingan *stakeholders* dan termasuk undang-undang perlindungan hukum dan aturan pengambilalihan.

B. Mekanisme internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan saham insider, struktur dewan komisaris dan karakteristik, proporsi dewan direksi independen, latar belakang direktur, komite audit, komite remunerasi, dan struktur kepemilikan perusahaan,

kepemilikan istitusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, dan dewan komisaris independen.

a. Kepemilikan Istitusional

Pemegang saham istitusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan istitusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *steakholder*.

Pemegang saham istitusional cenderung lebih banyak mempunyai informasi dari pada pemegang saham individu. Pada umumnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan istitusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor istitusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Cornett et al. (2006), menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor istitusional dapat membatasi perilaku manajer. Dengan demikian, keberadaan *investor istitusional* dapat mendorong manajer untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga investor istitusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan *investor istitusional* terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Nuriyatun, 2014).

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan konflik keagenan.

Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Nuriyatun, 2014).

c. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun, dewan komisaris komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing

anggota dewan komisaris termasuk komisaris Utama adalah setara. Jumlah dari dewan komisaris dapat disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (Nuriyatun, 2014).

d. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Sriwedari, 2012).

e. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pemimpin perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Bertanggung jawab penuh atas penugasan Perseroan untuk kepentingan maupun tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan. Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2008), Dewan direksi digambarkan sebagai

pendukung manajemen puncak yang pasif. Namun, ketika kinerja mulai merosot dan manajer tidak menawarkan rencana pemulihan yang terpercaya, dewan pun bertindak. Jika pemegang saham percaya bahwa perseroan berkinerja rendah dan bahwa dewan direksi tidak cukup agresif mengawasi manajer bertugas, mereka bisa mencoba mengganti dewan pada pemilihan berikutnya. Pemegang saham yang berseberangan akan berusaha meyakinkan pemegang saham lain untuk memilih daftar calon mereka menduduki dewan. Jika mereka sukses, dewan baru akan dipilih dan bisa mengganti tim manajemen saat ini. Menurut Boynton, Johnson, and Kell (2002), Dewan direksi (*Board of Directors*) berkepentingan dengan keahlian dan pengetahuan auditor tentang faktor resiko bisnis dan daya saing. Memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan baik untuk kepentingan para pemegang saham (Hermanto, 2017).

Mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan meningkatkan perusahaan mampu kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholder*. Selain itu, mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen (Paramitha, 2018).

2.4 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan namanya, bursa efek terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sedangkan efek menurut Undang-undang No. 8 TAHUN 1995, tentang pasar modal adalah tentang barang yang didagangkan di tempat jual beli tersebut (Wikipedia, 2023).

Jadi, singkat kata bursa efek adalah pasar dimana terjadi jual beli dari suatu perusahaan. Di Indonesia, tempat jual beli efek ini dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) yang berkantor di Jakarta dan memiliki dan memiliki kantor perwakilan di kota

lainnya. BEI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan *go public*. Di dalamnya tercatat 108 perusahaan yang menjadi anggota bursa. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu perusahaan yang sangat familier bagi kalangan investor. Adapun menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari berbagai pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut (Wikipedia, 2023).

Tercatat hingga bulan Mei 2023, terdapat 11 Sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah memasarkan sahamnya ke publik (Indonesia, 2023). Dari sektor tersebut terdaftar 864 perusahaan, yang terkategori pada sektor untuk tiap perusahaan sebagai berikut :

1. *Healthcare* : 30 Perusahaan
2. *Basic Materials* : 100 Perusahaan
3. *Financials* : 106 Perusahaan
4. *Transportation & Logistic* : 33 Perusahaan
5. *Technology* : 41 Perusahaan
6. *Consumer non-cyclicals* : 118 Perusahaan
7. *Industrials* : 60 Perusahaan
8. *Energy* : 80 Perusahaan
9. *Consumer cyclicals* : 145 Perusahaan
10. *Infrastructures* : 64 Perusahaan
11. *Property & Real Estate* : 87 Perusahaan

2.4.1 Jenis Instrumen dalam Bursa Efek Indonesia

Pembahasan mengenai BEI selanjutnya adalah terkait jenis instrumen. Adapun berikut adalah jenis-jenis instrumen yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia (Ananda, 2021) :

a. Saham

Secara umum, saham merupakan tanda kepemilikan seseorang, badan, atau lembaga dalam suatu perusahaan. Sejauh ini, saham masih menjadi instrumen yang paling banyak diperdagangkan dalam bursa efek.

b. Obligasi

Obligasi adalah jenis surat utang baik jangka menengah maupun jangka panjang yang bisa diperjualbelikan.

c. Waran

Waran merupakan hak untuk membeli saham atau obligasi pada waktu dan harga yang sudah ditentukan oleh penerbit waran atau perusahaan emiten.

2.4.2 Jenis Pelaku dalam Bursa Efek Indonesia

Bursa efek indonesia tidak lepas dari pelaku pasar yang ada di dalamnya, berikut adalah pelaku dalam bursa efek indonesia (Nusantara, 2023) ;

- a. *Emiten*; perusahaan penerbit efek (saham atau obligasi).
- b. *Investor*; orang-orang yang menanamkan modal pada emiten.
- c. Penjamin Emisi (*underwriter*); lembaga penjamin terjualnya saham dan obligasi sampai batas waktu tertentu dan target dana yang emiten butuhkan.
- d. Agen Penjualan; pihak yang menjual efek yang akan *go public* (IPO) tanpa kontrak dengan emiten terkait.
- e. Pialang (*broker*); perantara antara antara penjual (*emiten*) dan pembeli (*investor*).

2.5 Firm Size (Ukuran Perusahaan)

Menurut penelitian Riyanto (2001), ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva (Fitriyani, 2021).

Menurut Melawati, dkk, (2016) Ukuran Perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Sehingga ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap akses perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini,

perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Damayanti & Septiyanti, 2022).

2.5.1 Penentuan *Firm Size*

Menurut riset yang dilakukan dalam penelitian Wahyuni (2013), Ukuran perusahaan (*Firm Size*) dihitung dengan merubah struktur total aktiva perusahaan dengan menggunakan bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan atau *Firm Size* dikalkulasi dengan penggunaan logaritma natural total aset. Logaritma natural digunakan bertujuan untuk meminimalisir data dengan fluktuasi yang berlebihan. Penggunaan logaritma natural juga bertujuan menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan mencapai nominal triliunan rupiah tanpa merubah proporsi sebenarnya (Setiawan & Mahardika, 2019). Rumus dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dihitung berdasarkan total asetnya menggunakan logaritma natural. Jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, fluktuasi kurs akan berdampak terhadap ukuran perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan masih mengimpor dan bergantung dengan aset dari luar negeri dengan demikian beberapa akun yang terdapat dalam total aset akan terpengaruh oleh fluktuasi kurs (Setiawan & Mahardika, 2019).

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran dalam mengukur besar atau kecilnya perusahaan sesuai dengan klasifikasi yang ada. Isbanah (2015) membagi ukuran perusahaan menjadi 3 (tiga) ukuran yaitu besar, sedang, dan kecil. Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya aset total yang dimiliki perusahaan. Menurut Nasional & Pengantar (2014) berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, kategori perusahaan dikatakan perusahaan kecil yaitu jika perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000-Rp500.000.000, untuk perusahaan sedang sebesar Rp.500.000.000-Rp10.000.000.000, dan untuk perusahaan besar jika memiliki kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000. Apabila perusahaan tersebut memiliki aset yang besar

maka perusahaan akan melindungi stabilitas dan kondisi perusahaan, hal ini menyebabkan kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Untuk mengukur ukuran perusahaan dapat melihat total keseluruhan aset yang terlampir dalam laporan keuangan (Hanifah & Hariyati, 2021)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan untuk penyusunan proposal skripsi ini, peneliti menyuguhkan beberapa hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat memperluas filosofi yang diperlukan dalam menelaah penelitian yang dikerjakan. Dibawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Susetyo & Werdaningtyas, 2019) Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Kebijakan Dividen, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan	Good Corporate Governance (X1) Kebijakan Divide (X2) Struktur modal (X3) Nilai Perusahaan (Y)	1.Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45 periode 2011-2016. 2.Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45 periode 2011-2016. 3.Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45 periode 2011-2016. 4.Good Corporate Governance, Kebijakan Dividen, dan Struktur Modal secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45 periode 2011-2016.
2	(Gozali, 2012) Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan	Return On Equity (ROE) (X1) Return On Investment (ROI) (X2) Return On Asset (ROA) (X3) Net Profit Margin (NPM) (Y)	1.Return on equity adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai ROE adalah sebagai berikut (Brgiham and Gapenski, 1996; dalam Trinanda dan Mukodim, 2010:4): $ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity}}$. 2.Return On Investment adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang

			<p>dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, (Munawir, 2002; dalam Trinanda dan Mukodim, 2010:4). Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai ROI adalah: $ROI = \frac{\text{Laba operasi}}{\text{Aktiva operasi rata-rata}}$.</p> <p>3. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai ROA adalah: $ROA = \text{Margin laba} \times \text{Perputaran total aktiva}$.</p> <p>4. Net profit margin adalah kemampuan sales/penjualan perusahaan untuk memperoleh laba. Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai net profit margin (Brgiham and Gapenski, 1996; dalam Trinanda dan Mukodim, 2010:4). Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai NPM adalah: $NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}}$.</p>
3	<p>(Situmorang & Simanjuntak, 2019)</p> <p>Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.</p>	<p><i>Kepemilikan Institusional (X1)</i></p> <p><i>Dewan Direksi (X2)</i></p> <p>Komisaris Independen (X3)</p> <p>Return On Equity (ROE) (Y)</p>	<p>1. Kepemilikan Institusional dalam proporsi yang besar akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Dini Kristi 2014).</p> <p>2. Komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Alifia Faizun Nahari 2016).</p> <p>3. Semakin besar jumlah komisaris independen maka keputusan yang dibuat dewan komisaris lebih mengutamakan kepada kepentingan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Arifani, 2013).</p> <p>4. Menurut (Hery 2015) Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam</p>

			ekuitas.
4	(Ramdhaningsih & Utama, 2013) Pengaruh Indikator Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility	Ukuran dewan komisaris(X1) Komisaris independen (X2) Kepemilikan manajerial (X3) Kepemilikan institusional (X4) Profitabilitas (X5) Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Y)	1.Ukuran Dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. 2.Komisaris Independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. 3.Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. 4.Komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba 5.Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. 6.Profitabilitas berpengaruh positif pada pengungkapan CSR.
5	(Pratiwi, 2016) Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance(GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia(Periode 2010-2015)	Pengaruh penerapan GCG terhadap Rasio Capital Adequacy Ratio CAR (X1) Pengaruh penerapan GCG terhadap Rasio Non Performing Financing NPF (X2) Pengaruh penerapan GCC terhadap Rasio Return on Asset ROA (X3) Pengaruh penerapan GCG terhadap Rasio Return on Equity ROE (X4) Pengaruh penerapan GCG terhadap Rasio Net Income Margin NIM (X5) Pengaruh penerapan GCG dan Rasio Financing Deposits FDR (X6)	1.Kualitas penerapan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. 2.Kualitas penerapan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 3.Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 4.Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. 5.Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap NIM 6.Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap FDR. 7.Kualitas penerapan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO.

		Pengaruh penerapan GCG terhadap Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional BOPO (X7)	
6	(Fajri, 2022) Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumn Sektor Keuangan	Dewan Direksi (X1) Dewan Komisaris Independen (X2) Komite Audit (X3) Return On Assets (Y)	1.Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 2.Dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 3.Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 4.Pengukuran kinerja keuangan dibutuhkan untuk menilai keberhasilan perusahaan dan sebagai upaya untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa yang akan datang dan memotivasi untuk mencapai sasaran perusahaan.
7	(Suryanto & Refianto, 2019) Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan	Komite Audit(X1) Komisaris Independen (X2) Kepemilikan Institusional (X3) Kepemilikan Manajerial (X4) Kinerja Perusahaan (Y)	1.Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 2.Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 3.Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 4.Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 5.Komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan secara simultan.
8	(Irwondy & Hubeis, 2012) Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance terhadap Kinerja	Transparancy (X1) Accountability (X2) Responsibility (X3) Independency (X4) Fairness (X5) Kinerja Non-Kuangan Perusahaan (Y)	1.Transparancy tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja Perusahaan. 2.Accountability berpengaruh nyata terhadap kinerja Perusahaan. 3.Responsibility tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja Perusahaan. 4.Independency tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja Perusahaan.

	Non-Keuangan Di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia		5.Fairness tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja Perusahaan. 6.Prinsip Accountability adalah faktor yang paling dominan memengaruhi kinerja non-keuangan.
9	(Setiawan & Mahardika, 2019) Market To Book Value, Firm Size Dan Profitabilitas Terhadap Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014–2017)	Market to book Value (X1) Firm Size (X2) Profitabilitas (X3) Lindung Nilai (Y) Firm	1.Market to book Value berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan lindung nilai (<i>hedging</i>) di perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya. 2.Firm Size signifikan terhadap pengambilan keputusan lindung nilai (<i>hedging</i>) di perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya. 3.Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan lindung nilai (<i>hedging</i>) di perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya.
10	(Fitriyani, 2021) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Perbankan yang terdaftar di BEI	Dewan Komite Independen (DKI) (X1) Kepemilikan Institusional (KI) (X2) Ukuran perusahaan (X3) Return On Assets (ROA) (Y)	1.DKI berpengaruh terhadap ROA diterima 2 KI berpengaruh terhadap ROA diterima 3.Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh terhadap ROA diterima

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah indikator mekanisme internal dari *Good Corporate*

Governance dalam suatu perusahaan yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kemajuan kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Kinerja perusahaan akan diukur dengan rasio *profitabilitas*, yang diprosikan menggunakan *Net Profit Margin*.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan, esensi dari *Good Corporate Governance* antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya (Bukhori et al., 2012).

Arifin dan Chariri (2011) Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *Good Corporate Governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mekanisme pengendalian internal pada penelitian ini dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko yang disetujui oleh principal dan agent. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal misalnya adalah pemberian kontrak insentif jangka panjang, Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila kinerja perusahaan meningkat. Dengan demikian, terjadi hubungan yang mutual antara principal dan manajer. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang akan membuat

modal principal berkembang, karena disisi lain hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri (Bukhori et al., 2012).

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjabatani kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan (Bukhori et al., 2012).

Menurut Riniati (2015), Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Komite Audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota dewan komisaris terpilih yang pertanggung jawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai dengan 5 bahkan terkadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan (Damayanti & Septiyanti, 2022).

Menurut Makhdalena (2018), Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dapat menggunakan total aset (aset) dan total penjualan (*sales*) yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar akan menghasilkan jumlah penjualan yang besar dengan jumlah aset yang besar, sedangkan perusahaan kecil akan menghasilkan jumlah penjualan yang kecil dengan jumlah aset yang kecil. Total aktiva akan digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini. Jumlah besar maupun kecilnya aset perusahaan adalah ukuran perusahaan. Nilai aset agak lebih stabil daripada ukuran lain, sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan total aset sebagai proksi untuk ukuran perusahaan (Nurhadi, 2023).

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2012), merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan pelaksanaan keuangan. Keadaan keuangan, penghimpunan dana maupun

penyaluran dana bisnis semuanya tercermin dalam kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk menentukan kondisi keuangan perusahaan menguntungkan atau negatif selama periode waktu tertentu. Hal ini harus dilakukan agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menghadapi persaingan antar perusahaan. *Profitabilitas* digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini. *Profitabilitas* adalah kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan dan keputusan yang akan dilakukan di masa depan, serta merupakan indikator prospek masa depan perusahaan. *Profitabilitas* perusahaan yang tinggi memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber dana yang lebih besar baik dalam bentuk pinjaman (*eksternal*) maupun modal (*internal*) dari pemegang saham. (Nurhadi, 2023).

Menurut Sudana (2011) *Net Profit Margin* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. *Net Profit Margin* dapat dihitung dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih. Laba bersih setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan (Lestari & Sulastri, 2021). Dibawah ini rumus untuk menghitung *Net Profit Margin* sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

2.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik

mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi (H. Leon, 2017).

Menurut Mulyadi (2011: 185), Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak ditangan manajemen (direksi) (Hermanto, 2017). Ukuran dewan komisaris disini adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, yang ditetapkan dalam jumlah satuan (Siallagan & Machfoedz, 2006) (Fiadicha & Hanny Y, 2016)

Pada penelitian yang dilakukan Kiptoo et al. (2021), dan Happy et al. (2017), menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh dewan komisaris independen, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2017) dan (Ramiyati 2018) juga mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen secara signifikan mempengaruhi Kinerja Keuangan, Sedangkan menurut penelitian Putri Mirinda Dwi Damayanti & Ratna Septiyanti (2022), Dewan Komisaris berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.7.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Samsul (2006:72) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada dewan

komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. (H. Leon, 2017).

Menurut penelitian Hasil dari penelitian Setyawan (2019) menunjukkan bahwa proksi *Good Corporate Governance* yakni komite audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan menurut penelitian Putri Mirinda Dwi Damayanti & Ratna Septiyanti (2022), Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan hasil penelitian (Nusah & Pondaag, 2022) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2.7.3 Pengaruh *Firm Size* Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan menurut Suwito & Herawaty (2005), adalah skala yang mengkategorikan ukuran perusahaan dalam berbagai cara, salah satunya adalah total aset. Usaha kecil (perusahaan kecil), usaha menengah (perusahaan menengah), dan usaha besar (perusahaan besar) adalah tiga kategori yang dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran perusahaan (Nurhadi, 2023).

Menurut Sudarmaji & Sularto (2007), total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar perusahaan dapat digunakan sebagai acuan ukuran perusahaan. Ketiga hal tersebut dapat mewakili ukuran perusahaan, sehingga ketiga variabel ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan. Semakin banyak aset, modal yang diinvestasikan, penjualan, dan uang yang beredar, serta semakin besar kapitalisasi pasar, semakin terkenal suatu perusahaan di mata masyarakat. Saat menentukan ukuran perusahaan, nilai aset mengungguli nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dengan margin yang signifikan (lebih stabil) (Nurhadi, 2023).

Penelitian Faoziyyah & Laila (2020), dan Kabbani & Zanelidin (2021), kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan, menurut

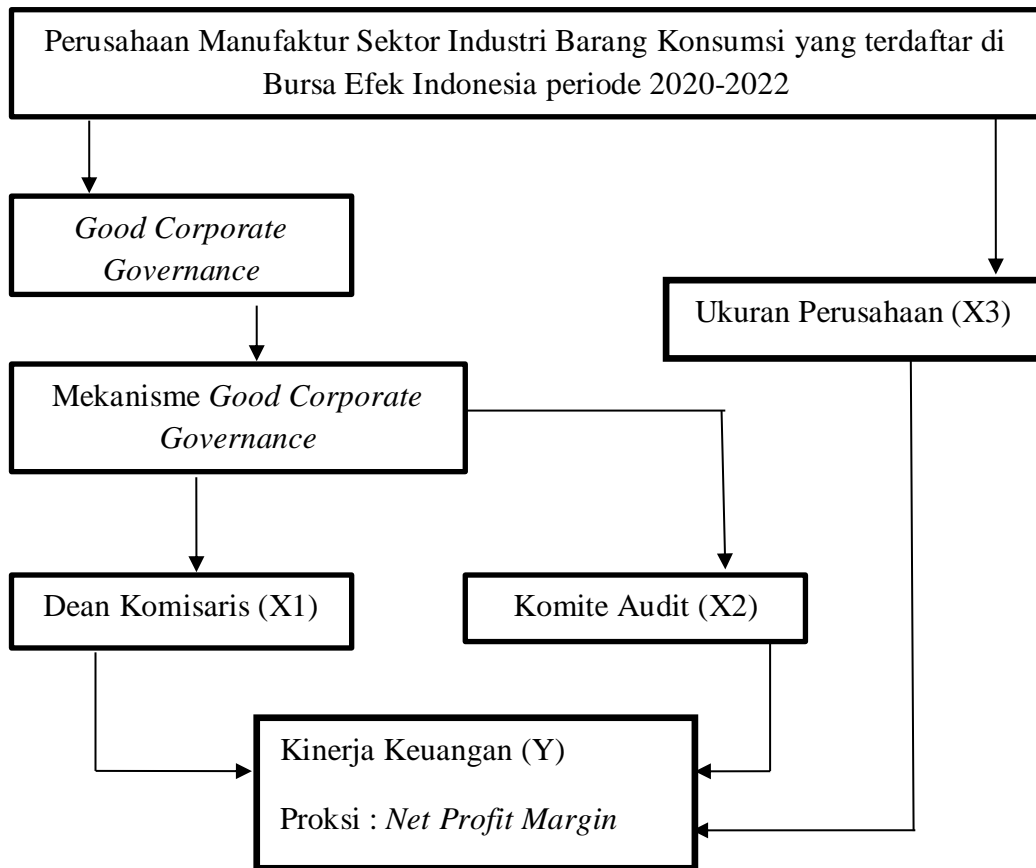
Gunawan dan Sutiono (2018), Pasha (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, menurut hasil penelitian Rifqi Rizqullah, dkk (2021) ukuran perusahaan berpengaruh positif & signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan hasil penelitian Pramudji dan Hardikasari (2011), Ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan hasil penelitian Sisilya Nusah Jessy J & Pondaag (2022), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif & tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.7.4 Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan *Firm Size* Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris, Komite Audit, merupakan komponen yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* hal itu dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Sedangkan Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aset, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar modal dan jenis pembiayaan eksternal lainnya yang menunjukkan kemampuan meminjam perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di tentukan dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Pada penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan Perusahaan peneliti akan menggunakan salah satu rasio, yaitu Rasio *Profitabilitas* yang akan diprosikan dengan menghitung *Net Profit Margin*. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak. Pengukuran rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif perusahaan beroperasi.

Berikut adalah bagan dari kerangka pemikiran pada penelitian ini.

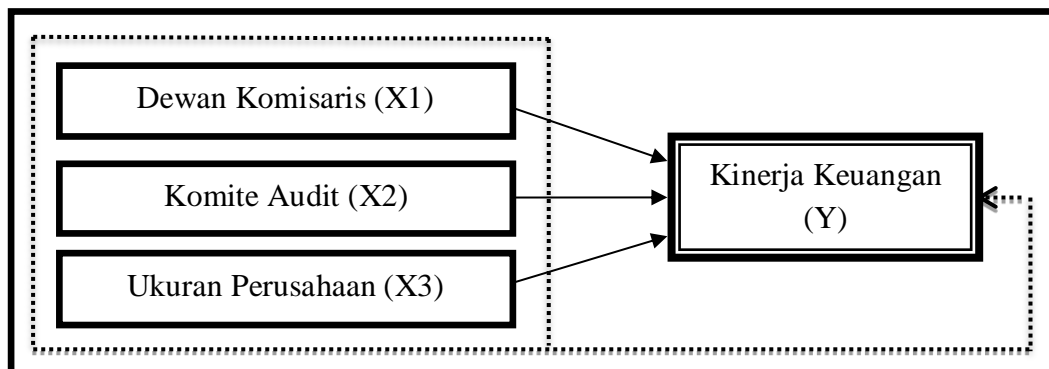
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.8 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun suatu model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Model Penelitian



Keterangan Gambar :

—————> : Menyatakan pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y secara parsial

.....> : Menyatakan pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y secara simultan

Berdasarkan model penelitian diatas maka hipotesis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan

H2 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan